

NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS ISI DALAM REGULASI NARKOBA DI FILIPINA TAHUN
2016 – 2018



Disusun Oleh:

MEIDIKA NUR SASMITO

(20150510197)

Pembimbing:

Dr. Surwandono, S.Sos., M.Si.

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul

**ANALISIS ISI DALAM REGULASI NARKOBA DI FILIPINA TAHUN
2016-2018**

Oleh:

MEIDIKA NUR SASMITO

20150510197



Yang Disetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Surwandono, S.Sos., M.Si.

ANALISIS ISI REGULASI NARKOBA DI FILIPINA TAHUN 2016-2018

Meidika Nur Sasmito

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[\(meydikans@gmail.com\)](mailto:meydikans@gmail.com)

Abstrak

Peredaran narkoba di Filipina telah berkembang pesat sehingga menjadi ancaman sosial dan keamanan, sehingga mendorong pemerintah Filipina untuk menanggapi masalah tersebut secara serius. Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba di Filipina telah di amandemen dengan demikian rupa serta dilengkapi dengan berbagai regulasi untuk menekan peredaran dan perkembangan narkoba di Filipina. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa paradigma yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan keamanan di Filipina dalam 7 dokumen produk regulasi dengan menggunakan metode *content analysis*. Analisa terhadap indikator yang mewakili dua paradigma, yaitu realisme dan liberalisme menunjukkan bahwa 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina sangat dipengaruhi oleh paradigma realisme.

Kata Kunci: Analisis Isi, Narkoba, Paradigma, Realisme.

Abstract

Drug trafficking in the Philippines has grown so rapidly that it has become a social and security threat, and encouraging the Philippine government to handle this problem seriously. The laws of drug in the Philippines have been amended in such a way and are equipped with various regulations to reduce the circulation and development of drugs in the Philippines. This paper aims to analyze the paradigm used in determining the direction of security policies in the laws of drug using the content analysis method. Analysis of indicators that represent two paradigms, realism and liberalism which shows that the laws of drug in the Philippines are strongly influenced by the realism paradigm.

Keywords: Content Analysis, Drug, Paradigm, Realism.

Pendahuluan

Perkembangan peredaran narkoba di Filipina menjadikan narkoba sebagai masalah serius yang dapat dikatakan hampir setara dengan masalah terorisme. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memandang bahwa peredaran narkoba akan merusak generasi muda yang nantinya akan meluas ke bidang-bidang lainnya. Duterte juga memiliki pandangan bahwa penggunaan shabu secara berkelanjutan akan “mengecilkan otak”, membuat pengguna “tidak layak lagi sebagai manusia di planet ini” (Lasco, 2016).

Jenis-jenis obat terlarang yang populer di Filipina adalah ekstasi *methylenedioxy*, shabu atau *methamphetamine*, opium, dan ganja. Shabu dan ganja termasuk dalam daftar obat-obatan terlarang yang dianggap oleh pemerintah Filipina sebagai ancaman besar. Keberadaan narkoba di Filipina terbagi menjadi dua, yaitu narkoba yang berasal dari produksi dalam negeri dan narkoba yang berasal dari jaringan narkoba internasional. Menurut laporan *Philippines Dangerous Drugs Board*, pada tahun 2005 terdapat lima juta pengguna shabu atau *methamphetamine* di Filipina atau setara dengan 6% jumlah masyarakat Filipina pada waktu itu. Hal tersebut telah menjadikan Filipina sebagai negara dengan pengguna shabu tertinggi di dunia pada tahun 2005 menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*.

Berdasarkan laporan Strategi Pengamanan Narkotika Internasional Departemen Luar Negeri Filipina pada tahun 2010, menegaskan bahwa perdagangan narkoba terus menimbulkan ancaman nasional yang signifikan. Kemudian, menurut PDEA (*Philippines Drug Enforcement Agency*), pada tahun tersebut perdagangan narkoba di Filipina mencapai US \$6 miliar hingga US \$8 miliar per tahun yang dimana angka tersebut akan terus meningkat. Pada awal tahun 2015, laporan dari PDEA (*Philippines Drug Enforcement Agency*) menyebutkan bahwa sekitar seperlima desa di Filipina memiliki kasus terkait narkoba. Wilayah memiliki dampak narkoba paling banyak adalah wilayah Metro Manila dengan 92% desanya memiliki kasus terkait narkoba (Retnowati, 2018).

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memandang bahwa dampak buruk dari perdagangan narkoba harus ditanggapi secara serius. Akhirnya pada pidato inagurasinya tanggal 30 Juni 2016, Duterte menerapkan kebijakannya untuk berperang melawan narkoba yaitu kebijakan *war on drugs*. Duterte mengatakan sebagai salah satu upaya kebijakan *war on drugs*, ia melegalkan untuk membunuh para pengedar narkoba yang ada di Filipina. Hal tersebut juga disebutkan dalam pidato kenegaraannya, ia mengatakan bahwa, "*Pemberantasan akan dilakukan secara terus menerus walaupun ada tekanan internasional dan tekanan di dalam negeri, pemberantasan tidak akan berhenti sampai mereka yang terlibat paham bahwa mereka harus menghentikan aksi mereka. Mereka harus menghentikannya karena pilihannya hanya ada penjara atau neraka*".

Kebijakan *war on drugs* ini memiliki perintah untuk menembak mati pelaku narkoba serta melaksanakan *Double Barrel Operation Plan*. *Double Barrel* adalah sebuah kampanye untuk merangi narkoba ilegal yang bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran akan narkoba melalui dua proyek, yaitu *TokHang Project (Lower Barrel Approach)* dan *HVT Project (Upper Barrel Approach)*. Duterte berharap semakin banyak warga Filipina yang sadar akan bahaya narkoba maka semakin banyak pengguna dan penjual narkoba yang memilih untuk menyerahkan diri mereka secara sukarela sebelum ditangkap paksa dalam *Double Barrel Operation Plan*.

Pemahaman masyarakat Filipina akan parah dan bahayanya masalah narkoba membuat mereka menyetujui serta merespon dengan baik kebijakan *war on drugs*. Seorang jurnalis Filipina, Iris Ulvang, menuturkan bahwa, "*War on drugs merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte karena ini merupakan hutang politik ketika kampanye, bahkan konstituen yang sebelumnya tidak menentukan pilihannya ke Duterte akan berbalik karena inisiatifnya pada bidang keamanan, dimana masyarakat pada waktu itu cukup mendambakan stabilitas keamanan Filipina yang kondusif khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari Manila*". (Bahaduri, 2017).

Masalah narkoba ini jika tidak di tanggap secara serius, akan berakar pada masalah keamanan negara yang lebih serius. Banyaknya kekacauan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh para pengguna narkoba secara terus-menerus tentunya akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Hal tersebut akan mendatangkan berbagai intervensi dari pihak luar dengan alasan “bantuan” ataupun “kemanusiaan” dan akan mencampuri urusan domestik negara itu sendiri.

Kebijakan *war on drugs* yang bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba di Filipina mendapatkan sorotan negatif dari dunia internasional dan beberapa dari dalam negeri, karena dianggap melanggar HAM yang telah disepakati pada UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948, dimana Filipina menjadi salah satu dari 48 negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. *Amnesty International* dan *Human Right Watch* memandang bahwa kebijakan *war on drugs* tersebut merupakan bencana besar HAM karena terbunuhnya lebih dari 1000 tersangka narkoba dalam waktu singkat. Selain itu, Senator Filipina, Leila de Lima, yang juga merupakan mantan ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan mantan sekretaris hukum pada masa pemerintahan sebelum Duterte, mengutuk perang terhadap narkoba dan mengadakan *public hearing* tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan pembunuhan di luar proses hukum yang ada di Filipina (Xu, 2016).

Undang-undang dan regulasi tersebut dapat dikatakan sebagai undang-undang yang represif dalam menanggapi isu narkoba di Filipina. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pasal dan ayat yang mengatur untuk menekan paksa pergerakan dan perkembangan narkoba, baik itu pengguna, penjual, maupun sindikatnya. Bahkan undang-undang dan regulasi tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia karena banyaknya angka kematian diluar hukum atau *extrajudicial killings* dalam 2 tahun masa pemerintahan Duterte.

Fenomena masalah narkoba yang terjadi di Filipina telah melahirkan beragam pendekatan dalam memandang dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina. Realisme merupakan pendekatan yang selalu memandang bahwa keamanan dan kepentingan negara merupakan prioritas utama yang harus

dilindungi. Sebuah negara akan dipandang sebagai pelindung dari wilayah, penduduk, dan integrasinya terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara dapat melakukan segala cara untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negerinya, bahkan tidak dapat dipungkiri jika negara mengeluarkan undang-undang dan kebijakan yang bersifat represif dalam menanggapi suatu isu (Williams, 2013).

Berbeda dengan realisme, pada pendekatan liberalisme ini hal yang menjadi fokus utama dalam perkembangan liberalisme adalah pandangan positif terhadap sifat manusia. Pada pendekatan ini, nilai-nilai seperti kebebasan, tanggung jawab, toleransi, keadilan sosial, dan kesamaan peluang merupakan pedoman yang perlu untuk ditekankan. Liberalisme memandang bahwa keamanan nasional dapat tercapai jika hak warga negara untuk hidup, bebas, dan sejahtera dapat terpenuhi (Jackson & Sorensen, 2014).

Kedua pendekatan di atas telah mempengaruhi cara pandang Filipina dalam menentukan arah kebijakan dalam tata kelola keamanan. Sejumlah problematika keamanan yang terjadi di Filipina serta signifikansi dokumen produk regulasi tentang narkoba sebagai produk hukum yang berperan penting dalam menjaga keamanan negara, menjadikan pembahasan mengenai pendekatan dalam keamanan di Filipina menarik untuk dikaji. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi teori serta pendekatan yang digunakan dalam pengaturan tata kelola keamanan di Filipina yang terkandung dalam 7 dokumen produk regulasi, yaitu *Republic Act 9165 / Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*, *Republic Act 10640*, *Executive Order No. 218 Series 2013*, *Executive Order No. 15 Series 2017*, *Command Memorandum Circular No. 16 Series of 2016*, *Dangerous Drugs Board Regulation No. 2 Series 2007*, dan *Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series 2016*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan mengukur pesan spesifik atau *signs* yang terkandung dalam 7 dokumen produk

regulasi tentang narkoba beserta penjelasannya. Untuk mengidentifikasi teori serta pendekatan yang digunakan dalam undang-undang di Filipina yang mengatur tentang narkoba, penulis akan menyusun secara logis sejumlah parameter tentang paradigma tata kelola keamanan dengan menggunakan dua kelompok pendekatan, yaitu realisme dan liberalisme. Kedua kelompok pendekatan tersebut berisikan klasifikasi dari sejumlah kata, frasa, kalimat, maupun simbol spesifik, dimana klasifikasi tersebut akan terbagi dalam lima indikator yang digunakan dalam pengukuran, yaitu aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan output (Surwandono, Herningtyas, & Dian Nursita, 2018).

Untuk menganalisa hasil pengukuran tersebut, peneliti telah menyusun dua hipotesa: pertama, undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina menggunakan pendekatan keamanan realisme, kedua, undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina menggunakan pendekatan keamanan liberalisme.

Analisa Terhadap Undang-Undang dan Regulasi Tentang Narkoba

Dalam undang-undang, narkoba didefinisikan sebagai zat yang tercantum dalam daftar pada Konvensi Tunggal tahun 1961 tentang Narkotika, sebagaimana telah di amandemen oleh Protokol 1972, dan dalam daftar yang tercantum pada Konvensi Tunggal 1971 tentang Zat Psikotropika. Zat tersebut dapat berupa alami maupun sintetis. Di Filipina, narkoba juga dianggap sebagai ancaman baik berupa penyakit sosial maupun merusak generasi muda. Maka dari itu penulis berusaha untuk menganalisa terhadap produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Dokumen yang akan digunakan sebagai obyek analisis terdiri dari berbagai level regulasi, seperti regulasi dalam level *Republic Act* atau UU adalah: R.A. No. 9165 atau yang dikenal sebagai *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* dan R.A. No. 10640. Sedangkan regulasi dalam level keputusan presiden adalah: *Executive Order No. 218 Series of 2003* dan *Executive Order No. 15 Series of 2017*. Kemudian regulasi dalam level institusi adalah: *Command Memorandum Circular No. 16 Series of 2016*, *Dangerous Drugs Board Regulation No. 2 Series 2007*, dan *Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series 2016*.

Terdapat lima indikator yang digunakan dalam menganalisa pendekatan yang digunakan dalam 7 dokumen produk regulasi yang mengatur tentang narkoba di Filipina, yaitu aktor, otoritas, sumber anggaran, tata kelola, dan output. Dari kelima indikator tersebut berisikan sejumlah kata, frasa, kalimat, maupun simbol spesifik yang kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok pendekatan, realisme dan liberalisme. Pada masing-masing *sign words* terdapat penambahan beberapa *sensitive words* untuk menyesuaikan indikator yang telah disusun dengan undang-undang yang akan dianalisa. Namun penambahan tersebut tidak terjadi pada semua *sign words*, penambahan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan penulis dan kebutuhan penelitian.

Dalam indikator ini, aktor didefinisikan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan atau terlaksananya dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina. Subjek tersebut dapat berupa perseorangan, kelompok, maupun lembaga pemerintahan. Indikator aktor ini diwakili dalam penggunaan sejumlah kata seperti negara, lembaga formal pemerintah, polisi, militer, kejaksaan, badan intelijen, dan negara asing pada pendekatan realisme. Kemudian terdapat kata individu, korporasi, kelompok, dan perusahaan pada pendekatan liberalisme.

Hasil analisa pada **Tabel 1** dibawah ini menunjukkan bahwa mayoritas persentase aktor pada pendekatan aktor adalah pendekatan realisme. Tingginya penggunaan kata dan frasa individu dalam produk regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor non negara memiliki keterkaitan yang lebih besar dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya dalam hal narkoba. Banyaknya penggunaan kata "*person*" menunjukkan bahwa produk regulasi tentang narkoba di Filipina cenderung lebih mengedepankan aktor-aktor non negara sebagai objek hukum dalam produk regulasi mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perorangan, kelompok, dan sindikat yang mengedarkan narkoba sehingga peredaran narkoba di Filipina dapat berkembang dengan pesat. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam indikator aktor tersebut menunjukkan bahwa kata "*government*" menempati urutan kedua sebagai penggunaan kata terbanyak dalam indikator aktor. Hal tersebut cukup unik karena pemerintah sebagai aktor negara seharusnya menempati urutan

pertama dalam penggunaan kata terbanyak dalam indikator tersebut, karena dalam mengatasi masalah narkoba cenderung harus melibatkan pemerintahan agar kepentingan dan kedaulatan negara dapat terlindungi.

Namun disisi lain, secara garis besar penggunaan kata aktor-aktor realisme pada 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba cenderung lebih tinggi dibandingkan penggunaan kata aktor-aktor liberalisme. Kecenderungan ini seolah-olah mengatakan bahwa aktor-aktor negara seperti aktor pemerintah, polisi, dan lembaga penegak hukum memiliki peran yang lebih banyak dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya dalam mengatasi masalah narkoba. Disamping itu, walaupun masalah narkoba di Filipina dianggap sebagai ancaman negara, namun masalah narkoba lebih mengarah di Filipina lebih mengarah pada isu keamanan dibandingkan dengan isu strategis atau pertahanan negara. Hal itu dibuktikan dengan lebih tingginya jumlah penggunaan kata ataupun frasa polisi dibandingkan dengan militer.

Banyaknya penggunaan kata “*person*” dan “*government*” yang berasal dari dua pendekatan yang berbeda mencitrakan bahwa produk regulasi tentang narkoba di Filipina tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja dalam mengatasi isu narkoba, namun produk regulasi tersebut dapat mengkolaborasikan kedua aktor pendekatan antara aktor-aktor pendekatan realisme, yang berarti segala sesuatunya merupakan tugas negara serta keamanan merupakan prioritas utama dan aktor-aktor liberalisme, yang berarti kebebasan, hak, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Kolaborasi dari kedua pendekatan tersebut kemudian telah menjadi pedoman pemerintah dalam mengatasi masalah narkoba di Filipina, dengan bertujuan untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta melindungi kesejahteraan masyarakat Filipina dari dampak narkoba yang berbahaya.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Indikator Aktor

Pendekatan	No.	Aktor	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							Total Kata
			R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	
Realisme	1.	<i>State</i>	11	0	1	0	0	0	0	12
	2.	<i>Country</i>	7	0	2	0	0	0	2	11
	3.	<i>Government</i>	36	1	9	1	7	20	6	80
	4.	<i>Court</i>	9	0	0	0	8	0	2	19
	5.	<i>Police</i>	0	1	1	1	30	6	3	42
	6.	<i>Military</i>	2	0	0	0	0	0	2	4
	7.	<i>Intelligence</i>	3	0	0	0	11	0	7	21
	8.	<i>Foreign State</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<i>Foreign Country</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	<i>Foreign Government</i>	9	0	1	0	0	0	0	10
	11.	<i>Law Enforcement</i>	21	0	4	2	3	0	22	52
	12.	<i>Judiciary</i>	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL			99	2	18	4	59	26	44	252
PERSENTASE			39,3%	66,7%	81,8%	80%	72,8%	96,3%	81,5%	56,8%
Liberalisme	1.	<i>Person</i>	104	1	0	0	5	0	4	114
	2.	<i>Individual</i>	7	0	1	0	0	0	0	8
	3.	<i>Corporation</i>	7	0	0	0	0	0	2	9
	4.	<i>Group</i>	9	0	0	0	7	0	3	19
	5.	<i>Organization</i>	18	0	2	0	4	0	0	24
	6.	<i>Syndicate</i>	3	0	1	1	6	1	1	13
	7.	<i>Company</i>	5	0	0	0	0	0	0	5
TOTAL			153	1	4	1	22	1	10	192
PERSENTASE			60,7%	33,3%	18,2%	20%	27,2%	3,7%	18,5%	43,2%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Hasil analisa pada **Tabel 2** dibawah ini menunjukkan bahwa mayoritas persentase otoritas pada indikator otoritas adalah pendekatan realisme. Banyaknya penggunaan kata “*reward*” menunjukkan bahwa produk regulasi tentang narkoba di Filipina cenderung lebih mengedepankan timbal balik atau hadiah jika seseorang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada lembaga yang berwenang dalam mengatasi narkoba. Hadiah yang dimaksud dapat berupa materi, jika orang tersebut merupakan rakyat biasa, kemudian dapat berupa kompensasi, jika orang tersebut merupakan pengguna narkoba yang telah ditangkap dalam operasi narkoba, dan penghargaan, jika orang tersebut merupakan salah satu dari aparat yang berwenang.

Data yang diperoleh dalam indikator otoritas tersebut menunjukkan bahwa kata “*penalty*” menempati urutan kedua sebagai penggunaan kata terbanyak dalam indikator otoritas. Pola yang sama terulang kembali seperti pada indikator aktor, dimana “*penalty*” merupakan salah satu cara yang dikampanyekan oleh Presiden Duterte dalam mengatasi masalah narkoba di Filipina, baik itu hukuman mati, seumur hidup, maupun hukuman dalam waktu tertentu.

Namun jika kita amati lagi, banyaknya penggunaan kata “*reward*”, “*penalty*”, yang kemudian disusul dengan kata “*fine*”, “*imprisonment*”, “*rehabilitation*”, dan “*treatment*”, seolah-olah mencitrakan kembali adanya kolaborasi dua pendekatan antara pendekatan realisme dan liberalisme. Dari hal ini seolah-olah produk regulasi tentang narkoba di Filipina ingin memberitahukan kepada kita bahwa para pengguna dan pecandu narkoba tersebut dapat dipandang melalui dua kacamata yang berbeda, yaitu sebagai kriminal atau sebagai pasien. Jika kita memandang mereka sebagai kriminal, maka solusi yang tepat adalah menjatuhkan mereka hukuman pidana seperti yang telah tertulis dalam undang-undang. Namun jika kita memandang mereka sebagai pasien, maka solusi yang tepat adalah memberikan mereka pengobatan.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Otoritas

Pendekatan	No.	Otoritas	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							Total Kata
			R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	
Realisme	1.	<i>Arrest</i>	8	0	2	0	7	1	14	32
	2.	<i>Detention</i>	7	0	2	0	0	0	2	11
	3.	<i>Detain</i>	1	0	0	0	1	0	0	2
	4.	<i>Investigation</i>	11	0	2	0	9	0	4	26
	5.	<i>Surveillance</i>	4	0	0	0	0	0	1	5
	6.	<i>Penalty</i>	61	0	0	0	0	0	0	61
	7.	<i>Imprisonment</i>	40	0	0	0	0	0	0	40
	8.	<i>Custody</i>	9	3	0	0	1	0	1	14
	9.	<i>Fine</i>	42	0	0	0	0	0	0	42
	10.	<i>Punishment</i>	9	0	1	0	0	0	0	10
	11.	<i>Prosecution</i>	23	0	2	0	3	0	2	30
TOTAL			215	3	9	0	21	1	24	273
PERSENTASE			68,5%	66,7%	75%	0%	80,8%	16,7%	14,6%	51,9%
Liberalisme	1.	<i>Rehabilitation</i>	37	0	1	0	4	3	0	45
	2.	<i>Treatment</i>	30	0	1	0	0	1	0	32
	3.	<i>Cooperation</i>	6	0	0	0	0	0	2	8
	4.	<i>Bargain</i>	2	0	0	0	0	0	0	2
	5.	<i>Consideration</i>	6	0	0	0	0	1	2	9
	6.	<i>Consolidation</i>	1	1	0	0	0	0	0	2
	7.	<i>Exemption</i>	2	0	0	0	0	0	0	2
	8.	<i>Release</i>	8	0	1	0	0	0	1	10
	9.	<i>Reward</i>	1	0	0	0	0	0	88	89
	10.	<i>Compensation</i>	5	0	0	0	0	0	0	5
	11.	<i>Award</i>	1	0	0	0	1	0	47	49
TOTAL			99	1	3	0	5	5	140	253
PERSENTASE			31,5%	33,3%	25%	0%	19,2%	83,3%	85,4%	48,1%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Hasil analisa pada **Tabel 3** dibawah ini menunjukkan bahwa pada indikator sumber anggaran, pendekatan realisme lebih mendominasi pada produk regulasi ini. Tingginya penggunaan kata dan frasa donasi dalam produk regulasi tersebut menunjukkan bahwa dana yang digunakan dalam mengatasi masalah narkoba di Filipina tidak hanya berasal dari institusi atau anggaran pemerintah saja, namun juga berasal dari donasi-donasi. Data yang diperoleh dalam indikator sumber anggaran tersebut juga menunjukkan subsidi, anggaran negara, dan institusi juga berkontribusi sebagai sumber anggaran dalam menjalankan produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Sesuai yang diatur dalam *Article X Section 87 R.A No. 9165*, dimana *Philippine Charity Sweepstakes Office (PSCO)* tiap tahunnya menyumbangkan sebesar 12 juta peso sebagai dana umum pelaksanaan undang-undang dan setidaknya 50% dari dana tersebut akan dicadangkan untuk bantuan pusat rehabilitasi milik pemerintah atau pribadi. Selanjutnya *Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)* akan memberikan sebagian dana yang dihasilkan sebesar 5 juta peso tiap bulannya yang kemudian akan disisihkan untuk membangun pusat rehabilitasi narkoba yang memadai di Filipina serta untuk biaya pemeliharaan dan pengoperasian pusat rehabilitasi tersebut. Temuan tersebut membuktikan lagi adanya keseimbangan antara pendekatan liberalisme dan realisme pada produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Indikator Sumber Anggaran

Pendekatan	No.	Sumber Anggaran	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							Total Kata
			R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	
Realisme	1.	<i>Government*</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	<i>Institution</i>	1	0	0	1	0	0	0	2
	3.	<i>State Budget</i>	1	0	0	0	0	1	0	2
	4.	<i>Subsidy</i>	2	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL			4	0	0	1	0	1	0	6
PERSENTASE			50%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	60%
Liberalisme	1.	<i>Debt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	<i>Donation</i>	4	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL			4	0	0	0	0	0	0	4
PERSENTASE			50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

**sign words yang diteliti hanya sign words yang memiliki keterkaitan dengan sumber anggaran*

Hasil analisa pada **Tabel 4** dibawah ini menunjukkan bahwa mayoritas persentase tata kelola pada indikator tata kelola adalah pendekatan realisme. Tingginya penggunaan kata dan frasa operasi dalam produk regulasi tersebut menunjukkan bahwa pandangan dari produk regulasi tentang narkoba di Filipina, melakukan operasi merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah narkoba yang sedang terjadi. Hal ini juga selaras dengan adanya kebijakan *war on drugs* yang telah dicanangkan oleh Presiden Duterte sejak tahun 2016 silam, yaitu dengan melegalkan membunuh pengguna dan penjual narkoba serta melaksanakan operasi TokHang dan HVT.

Data lain yang diperoleh dalam indikator tersebut adalah kata dan frasa informasi menempati urutan kedua sebagai jumlah penggunaan kata terbanyak dalam indikator tata kelola. *Sign words* pendekatan liberalsime tersebut memiliki tujuan untuk melancarkan apa yang telah direncanakan dalam produk regulasi tentang narkoba di Filipina, yaitu dengan mencari informasi terkait dengan pengguna, penjual, bahkan sindikat baik yang bersifat individu maupun kelompok.

Hal yang menarik pada indikator ini adalah kata "*freedom*" yang merupakan poin inti dari pendekatan liberalisme justru tidak tercantum dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina. Justru kata "*civil right*" memiliki frekuensi penggunaan kata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kata "*freedom*". Dimana kemudian dapat kita lihat bahwa pemerintah Filipina dalam mengatasi narkoba lebih mengutamakan hak masyarakat daripada memberikan kebebasan.

Duterte dalam pidatonya juga mengatakan "Perang ini akan menjadi tanpa henti dan kejam, jika Anda mau, seperti pada hari saat ini dimulai.", dimana yang dimaksud oleh Duterte adalah ia tidak akan memberikan toleransi terhadap para pengguna dan penjual narkoba dengan tujuan agar meminimalisir perkembangan dan peredaran narkoba di Filipina.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Indikator Tata Kelola

Pendekatan	No.	Tata Kelola	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							Total Kata
			R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	
Realisme	1.	<i>Operation</i>	15	0	7	6	72	38	133	271
	2.	<i>Threat</i>	0	0	1	0	0	0	0	1
	3.	<i>Power</i>	9	0	1	1	0	2	5	18
	4.	<i>Regulation</i>	25	1	0	0	3	2	10	41
TOTAL			49	1	9	7	75	42	148	331
PERSENTASE			60,5%	100%	90%	100%	78,1%	93,3%	95,5%	83,8%
Liberalisme	1.	<i>Information</i>	30	0	1	0	19	3	7	60
	2.	<i>Civil Right</i>	2	0	0	0	2	0	0	4
	3.	<i>Freedom</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			32	0	1	0	21	3	7	64
PERSENTASE			39,5%	0%	10%	0%	21,9%	6,7%	4,5%	16,2%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Hasil analisa pada *Tabel 5* dibawah ini menunjukkan bahwa output pada indikator output yang terkandung dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina juga menunjukkan cara pandang realisme dibandingkan dengan cara pandang liberalisme. Tingginya penggunaan frasa dan kata hukum menunjukkan bahwa penghormatan dan kepastian terhadap hukum di Filipina merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu dalam output yang terkandung dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, kata “*law*” memperoleh frekuensi paling banyak dalam penggunaan sejumlah kata. Selanjutnya kata yang memperoleh frekuensi paling banyak kedua dalam penggunaan sejumlah kata adalah kata “*rule*”, dimana kata “*rule*” itu sendiri merupakan *sensitive words* dari frasa dan kata hukum.

Hal tersebut membuktikan bahwa selain mengupayakan kondisi keamanan nasional, ketertiban, dan stabilitas, penghormatan dan kepastian hukum juga menjadi fokus utama pemerintah Filipina sebagai ujung tombak dalam mengatasi narkoba. Selain itu pemerintah Filipina juga memberikan hukum yang kuat dan tegas agar setiap masyarakat Filipina mendapatkan haknya untuk bebas dari narkoba.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Indikator Output

Pendekatan	No.	Output	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							Total Kata
			R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	
Realisme	1.	<i>Security</i>	1	0	0	0	1	0	1	3
	2.	<i>Stability</i>	2	0	0	0	0	0	0	2
	3.	<i>Discipline</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	<i>Orderliness</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	<i>Law</i>	97	2	0	0	8	1	86	194
	6.	<i>Rule</i>	24	1	0	0	4	1	1	31
TOTAL			124	3	0	0	13	2	88	230
PERSENTASE			93,2%	75%	0%	0%	100%	100%	100%	95,8%
Liberalisme	1.	<i>Peace</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	<i>Independence</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	<i>Justice</i>	9	1	0	0	0	0	0	10
	4.	<i>Prosperity</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			9	1	0	0	0	0	0	10
PERSENTASE			6,8%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	4,2%

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

Dari kelima hasil analisis indikator tersebut kemudian akan dijadikan satu menjadi tabel kumulatif untuk mempermudah dalam menyimpulkan hasil analisis dari dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Indikator Kumulatif

No.	Indikator	Pendekatan	
		Realisme	Liberalisme
1.	Aktor	56.8%	43.2%
2.	Otoritas	51.9%	48.1%
3.	Sumber Anggaran	60%	40%
4.	Tata Kelola	83.8%	16.2%
5.	Output	95.8%	4.2%
TOTAL		69.7%	30.3%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kesimpulan

Berdasarkan analisis isi dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen produk regulasi tersebut cenderung mengarah pada pendekatan realisme. Analisa mengenai arah kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan nasional dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina menunjukkan bahwa negara dalam mengatasi masalah narkoba cenderung menggunakan kebijakan yang menekan paksa baik itu dari perkembangan dan peredaran narkoba. Karakteristik utama yang diciptakan pada produk regulasi tentang narkoba di Filipina adalah penekanannya pada hukuman sebagai kebijakan kontrol. Oleh karena itu Presiden Duterte dalam menerapkan kebijakan berperang terhadap narkoba terbukti bahwa ia tidak melakukan *abuse of power*.

Daftar Pustaka

Buku:

Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2014)

Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook* (California: Sage Publications, 2002)

Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994)

Paul Williams, *Security Studies: An Introduction* (London: Routledge, 2013)

Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Teresa S. Encarnacion Tadem dan Noel M. Morada, *Philippine Politics and Governance: An Introduction* (Quezon: University of the Philippines, 2006)

Teresa S. Encarnacion Tadem dan Noel M. Morada, *Philippine Politics and Governance: Challenges to Democratization and Development* (Quezon: University of the Philippines, 2006)

Jurnal:

Armando F. de Jesus dkk, "Philippine Policies on Illicit Drugs: History, Content, Process and Outcome". *Research Cluster on Culture, Education and Social Issues*. 2012

Azwar Asrudin, "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma". *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. Vol. 1. No. 2, Desember 2014

Danus Ardiansah, "Metode Penelitian Komunikasi 3: Analisis isi (Kuantitatif)", diakses dari [https://www.academia.edu/11381625/Metode Penelitian Komunikasi Analisis Isi](https://www.academia.edu/11381625/Metode_Penelitian_Komunikasi_Analisis_Isi)

Dan Jerome Barrera, "Drug War Stories and The Philippine President". *Asian Journal of Criminology*. Juni 2017

Erwin Yusup Sitorus, "Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-Terrorisme". *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*. Vol. 3. No. 2, Juli 2017

Ricardo M. Zarco, "A Short History of Narcotic Drug Addiction in the Philippines, 1521-1959". *Philippine Sociological Review*. Vol. 43. No. 1-4, 1995

Surwandono, dkk, "Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara". *Jurnal Mandala*. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni 2018

Skripsi:

Chusnul Retnowati, Skripsi: “*Upaya Human Rights Watch (Hrw) Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte Di Filipina*” (Yogyakarta: UMY, 2018)

Laila Rezvina Baswedan, Skripsi: “*Kebijakan War On Drug Presiden Rodrigo Duterte Di Tengah Tekanan Aktor Internasional*” (Yogyakarta: UMY, 2017)

Rahadian Sunna Bahaduri, Skripsi: “*Kebijakan War On Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte*” (Yogyakarta: UMY, 2017)

Undang-undang:

Command Memorandum Circular No. 16 – 2016, ”PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: ”Double Barrel”

Republic Act of Phillipine No. 9165

Artikel Online:

BBC, “*Soal narkoba, Presiden Duterte berjanji tak akan tunduk pada tekanan internasional*”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40704806>

Cecille Suerte Felipe, “*PNP: 22,983 deaths under inquiry since drug war launched*”, diakses dari <https://www.philstar.com/headlines/2018/06/11/1823545/pnp-22983-deaths-under-inquiry-drug-war-launched>

Clare Baldwin & Andrew R.C. Marshall, “*As death toll rises, Duterte deploys dubious data in ‘war on drugs’*”, diakses dari <https://www.reuters.com/investigates/special-report/philippines-duterte-data/>

Dangerous Drugs Board, “History”, diakses dari <https://www.ddb.gov.ph/about-ddb/history>

Gideon Lasco, “*Just how big is the drug problem in the philippines anyway?*”, diakses dari <https://theconversation.com/just-how-big-is-the-drug-problem-in-the-philippines-anyway-66640>

PDEA, “*Real Numbers PH*”, diakses dari <http://pdea.gov.ph/2-uncategorised/279-realnumbersph>

Sheena C. Greitens, “*Terrorism in the Philippines and U.S.-Philippine security cooperation*”, diakses dari <https://www.brookings.edu/opinions/terrorism-in-the-philippines-and-u-s-philippine-security-cooperation/>

The Philippine Star, “*Gov’t employees positive for drugs out on 1st offense*”, diakses dari <https://www.philstar.com/headlines/2017/03/17/1679808/govt-employees-positive-drugs-out-1st-offense#H6KjHcIHeXY9Ow7K.99>